

DINAMIKA DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SARAWAK MALAYSIA

Hana Novia

Program Studi Magister Hubungan Internasional
Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: hnovia06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mayoritas berstatus undocumented di perkebunan kelapa sawit Sarawak Malaysia melalui Community Learning Center (CLC) karena anak-anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibuatlah rumusan penelitian yaitu "bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak PMI undocumented di Sarawak Malaysia?" Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini mengimplementasikan konsep kepentingan nasional dan diplomasi soft power untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam artikel jurnal ini. Temuan yang didapat dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diplomasi yang relatif panjang dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan CLC di Sarawak Malaysia yang merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah Indonesia dalam memenuhi pendidikan anak PMI yang mayoritas undocumented dimanapun mereka berada.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Malaysia, Sarawak, Pendidikan, Community Learning Center (CLC)

ABSTRACT

The aim of this research is to discuss about Indonesian government diplomacy in providing access to education for Indonesian Migrant Workers (PMI) through Community Learning Center (CLC) because PMI's children have their right to get a proper basic education. Based on these conditions, the research question arises in this case is "How is the diplomacy of the Indonesian government in handling with the education problems of undocumented PMI children in Sarawak, Malaysia?". By using descriptive analysis methods sourced from primary, secondary and tertiary data. This research implements the concept of national interest and diplomacy soft power to answer the research in this journal article. The result of this study shows that the Indonesian government carried out a relatively long diplomacy with the Malaysian government to establishing CLC in Sarawak Malaysia which is a form of the Indonesian government's concern in fulfilling the education of PMI's children who are mostly undocumented wherever they are.

Keywords: Government of Indonesia, Malaysia, Sarawak, Education, Community Learning Center (CLC)

PENDAHULUAN

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk bagaimana meningkatkan kerja sama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibangun melalui berbagai cara. Salah satu bentuk dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia adalah kerja sama dalam meningkatkan perdagangan dan investasi, pengiriman tenaga kerja serta terkait pendidikan anak-anak PMI di Sabah dan Sarawak. Di Indonesia, migrasi menjadi salah satu fenomena

yang cukup membantu bagi banyak masyarakat. Faktor kemudahan bermigrasi dan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menjadi pendorong banyak warga negara Indonesia (WNI) memilih untuk bekerja di luar negeri. Malaysia merupakan negara tujuan utama pengiriman PMI bermula sejak penerapan *New Economic Policy* (NEP) di Malaysia pada tahun 1971-1990. Pull factornya adalah ketika NEP yang diterapkan oleh Malaysia secara agresif mendukung pembangunan ekonomi yang mengarah pada sektor-sektor industrialisasi dan ekspor. Kemudian pada tahun 1980-an, sektor pertanian yang berkembang juga memerlukan tambahan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi push factor untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di Malaysia. Kondisi ini menyebabkan PMI mendominasi tenaga kerja asing di Malaysia. Pada tahun 2019, jumlah PMI yang tercatat berangkat ke luar negeri adalah 276.553 orang, paling banyak ditempatkan di Malaysia yaitu 79.663 orang PMI. (BNP2TKI, 2019) Malaysia merupakan negara penerima PMI terbesar di Asia Tenggara.

Salah satu dampak negatif dari tingginya jumlah PMI di Malaysia adalah meningkatnya jumlah anak dari PMI, karena berdasarkan peraturan keimigrasian Malaysia yang mengatur bahwa tenaga kerja non-profesional seperti pembantu rumah tangga, pekerja pabrik dan juga pekerja perkebunan atau perladangan sawit seperti PMI di Sarawak Malaysia ini tidak boleh menikah bahkan membawa serta keluarganya. Faktanya, banyak diantara para pekerja non-profesional tersebut menikah, membawa keluarganya atau bahkan melahirkan anak di Malaysia. Akibatnya yang menjadi korban adalah anak-anak PMI yang posisinya menjadi *non-procedural*, dimana mereka tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak diakui keberadaannya di Malaysia. Kondisi ini yang menyebabkan banyak anak-anak Indonesia di wilayah Sarawak yang diperkirakan ada sekitar 3.000 anak yang membutuhkan akses dan layanan pendidikan dasar. (Purbayanto, 2018). Hal tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan baru, karena secara hukum PMI dan anak-anaknya yang tidak berdokumen resmi tidak memiliki perlindungan hukum di negara tujuan, upah PMI menjadi sangat murah, tidak terjamin asuransi, dan tidak terproteksi, hal tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi.

Minimnya sarana pendidikan serta tuntutan perekonomian memaksa anak-anak PMI untuk bekerja membantu orang tuanya demi memenuhi kebutuhan keluarga, yang berdampak pada sulitnya anak-anak PMI ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan para anak-anak tersebut memiliki hak atas akses pendidikan dasar. Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia, saat ini masih mengalami beberapa hambatan. Pada tingkatan kebijakan, terdapat larangan bagi anak-anak pekerja asing untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta menjadi alternatif terakhir dengan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau bagi para PMI yang ingin menyekolahkan anak-anaknya. (Kemdikbud, 2019) Melihat banyaknya jumlah anak

yang belum terlayani pendidikan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia termasuk perwakilan Republik Indonesia di Malaysia yaitu KBRI Kuala Lumpur dalam melindungi anak-anak tersebut yang merupakan bagian dari WNI. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemikiran bahwa pendidikan bagi beberapa PMI memang bukan menjadi prioritas, sikap orang tua yang kurang menyadari arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka juga sering menjadi kendala. Pada akhirnya banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan memilih untuk membantu orang tuanya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Beberapa kendala lainnya juga dihadapi oleh pemerintah Indonesia terkait keterbatasan pendidikan yang ada, sehingga memang diperlukan pendidikan yang layak bagi anak-anak PMI.

Pemerintah Indonesia wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan termasuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Sarawak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan pemenuhan hak atas pendidikan secara progresif bagi mereka. Salah satu kebijakan Indonesia di bidang pendidikan layanan khusus adalah menjalin kerjasama dengan mitra eksternal pemerintah dalam hal ini antara lain Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kinabalu, dan Pejabat Pelaksana Tugas dan Fungsi KJRI Tawau yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Kantor Imigrasi Sabah, Departemen Pendidikan Negara Bagian Sabah, Asosiasi Perkebunan di Sabah, Perusahaan kelapa sawit, dan LSM Humana Child Aid Society. (Notoprayitno, 2015) Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki cakupan yang cukup luas, termasuk kerja sama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibangun melalui berbagai cara. Salah satu bentuk kerja sama Indonesia dan Malaysia adalah pemenuhan akses pendidikan anak PMI di Sarawak Malaysia. Karena jumlah pekerja dan anak-anak Indonesia terus meningkat, pemerintah Indonesia akhirnya mendirikan Community Learning Center (CLC) di perkebunan untuk anak-anak Indonesia di Sarawak. (Wong et al., 2021) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pendidikan anak-anak PMI pada sektor perkebunan sawit di Sarawak yang diselenggarakan melalui Community Learning Center (CLC) adalah dengan mengirimkan guru bina, dan melengkapi sarana dan prasarana.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk bagi anak Indonesia yang berada di Malaysia. Pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur membantu memberikan akses pelayanan pendidikan yang terfokuskan pada konsep *"education for all"* yang kemudian diterapkan di CLC Sabah dan Sarawak, bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tidak memandang latar belakang status ekonomi dan budaya dalam memperoleh akses Pendidikan. (Rahmawati, 2018) Namun, mayoritas anak-anak PMI ini berstatus *undocumented* sehingga tidak mendapatkan akses pendidikan dari pemerintah Malaysia. Keberadaan anak-anak PMI di Sabah dan Sarawak ini menimbulkan kenyamanan bagi para

pekerja karena mereka bisa dekat dengan keluarganya, namun di sisi lain, anak-anak PMI ini tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dari pemerintah Malaysia.

Permasalahan terkait keterbatasan akses pendidikan bagi anak PMI ini harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan kerja sama yaitu berdiplomasi dengan pemerintah Malaysia terkait permasalahan di bidang pendidikan ini, karena pendirian CLC tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja, tetapi juga membutuhkan peran pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendirikan CLC. Kerja sama yang berjalan baik tentunya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pendidikan juga diharapkan menjadi faktor perubahan dalam masyarakat sebagai upaya untuk mengubah dan meningkatkan kualitas hidup secara pribadi dan sosial (Priestley et al., 2012). Pendidikan berperan penting bagi anak-anak PMI, terutama jika melihat banyaknya orang tua mereka yang harus bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia dengan upah yang tidak besar dan mengorbankan keamanan juga keselamatan mereka sehingga diharapkan dengan diaksesnya pendidikan bagi anak-anak PMI ini dapat memutus rantai kemiskinan dan dapat mengubah nasib mereka sendiri untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Merujuk pada sejumlah studi terdahulu yang membahas mengenai topik yang berkaitan tentang pentingnya pendidikan bagi anak PMI di Sarawak Malaysia, artikel ini akan lebih membahas diplomasi pemerintah Indonesia terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak PMI melalui CLC khususnya di Sarawak Malaysia. Anak-anak PMI yang berstatus *undocumented* di Sarawak ini membentuk masalah baru yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi. Sehingga, yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak PMI *undocumented* di Sarawak Malaysia?

KERANGKA ANALISIS

Dalam dunia internasional, hubungan baik antara satu negara dengan negara lainnya merupakan hal yang penting untuk dipertahankan. Dengan memiliki hubungan yang baik, akan memberikan dampak positif bagi suatu negara, seperti dalam pencapaian kepentingan nasional. Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Kepentingan nasional adalah sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Apapun bentuk pemerintahannya, suatu negara pasti akan selalu bertindak dalam kerangka kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional negara

tidak hanya berfokus pada pembentukan kekuasaan atau keamanan semata, tetapi juga mencakup ekonomi dan hubungan baik antar negara. (Nye, 1992) Maka peran suatu negara menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam mewakili kepentingan nasionalnya pada dunia internasional agar dapat terpenuhi.

Konsep kepentingan nasional sebagai tujuan kesejahteraan pemerintah nasional dalam lingkup internasional. Ini menunjukkan kepentingan nasional suatu negara akan mempertahankan otonomi politik dan integrasi nasionalnya untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya di dunia internasional. (Oppenheim, 1987) Sikap dan aktivitas negara dalam politik internasional membentuk adanya order, tatanan yang memungkinkan hubungan antar-negara tidak melulu diwarnai oleh konflik, melainkan hubungan koeksistensial yang stabil. Hubungan koeksistensial adalah kondisi hidup berdampingan secara damai antara dua negara atau lebih. (Burchill, 2005) Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Negara merupakan aktor utama dalam kepentingan nasional yang mengambil keputusan dan memainkan peranan penting dalam dunia internasional yang berdampak besar terhadap masyarakat dalam negerinya. Salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional adalah dengan diplomasi.

Diplomasi merupakan salah satu cara negara untuk melakukan interaksi untuk membangun hubungan baik dengan negara lain dan mencapai kepentingan nasionalnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional yang dilakukan melalui korespondens, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. (Djelantik, 2008). Melalui diplomasi, negara dapat memperoleh kekuatan dan pengaruh di dunia internasional tanpa menekankan upaya-upaya militer. Kepentingan nasional memiliki kaitan erat dengan diplomasi karena diplomasi memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan suatu negara. (Djelantik, 2008) Diplomasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga agar hubungan kedua belah pihak tetap baik juga cara menjalin kerja sama dalam hubungan internasional. (Djelantik, 2016) Diplomasi digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan dari negara lain atas prinsip dan keputusan yang diambilnya.

Negara memerlukan kekuatan atau *power* yang dapat digunakan mempengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Joseph Nye, *power* adalah kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nye menggolongkan *power* dalam

dua kategori yaitu *hard power* yang digolongkan dalam spektrum perilaku *command power* atau kemampuan untuk mengubah apa yang pihak lain lakukan dan *soft power* dalam spektrum perilaku *co-optive power*, yaitu kemampuan untuk dapat mempengaruhi dan membentuk apa yang kita inginkan. (Nye) *Soft Power* adalah kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tersebut melalui penggunaan daya tarik dibandingkan penggunaan kekerasan atau imbalan. Nye menjelaskan bahwa *soft power* suatu negara utamanya didasarkan pada tiga sumber, yaitu kebudayaan, nilai politik dan kebijakan luar negeri. (Nye) Kebudayaan sebagai salah satu sumber utama *soft power* dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni *high culture*, seperti seni, literatur, dan pendidikan yang menarik perhatian elit tertentu serta *pop culture*, yang berfokus pada produksi hiburan massal. Diplomasi *soft power* antara pemerintah Indonesia dan Malaysia berperan penting terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Sarawak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkap dan memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif melalui kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu dan perilaku yang diamati dalam penelitian. Data didapatkan melalui sumber primer, sekunder, dan tersier. Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) RI KBRI Kuala Lumpur, Mokhamad Farid Maruf. Sementara data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi yang diterbitkan lembaga terkait penelitian. Data tersier diperoleh melalui internet, berupa artikel-artikel. Kegiatan pengumpulan data tersebut dilakukan untuk memberikan data-data yang akurat dan komprehensif mengenai topik penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada topik diplomasi Indonesia dalam memberikan akses pendidikan anak-anak PMI di Sarawak Malaysia.

PEMBAHASAN

Status *Undocumented* PMI dan Keluarganya di Malaysia

Dampak dari peningkatan jumlah PMI adalah memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut serta dalam proses pengiriman PMI ke Malaysia. Mudah-mudahan proses bermigrasi membuat sebagian orang yang akan menjadi PMI memilih untuk tidak mengikuti prosedur yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang pada akhirnya, membuat status *undocumented* pada PMI. Peraturan Ketenagakerjaan di Malaysia merupakan permasalahan keimigrasian utama bagi para PMI, antara lain mewajibkan para pekerja migran di Malaysia bekerja secara formal, memiliki dokumen-

dokumen legal, tidak boleh membawa serta anggota keluarga untuk menemani atau ikut tinggal di Malaysia, dan dilarang melakukan pernikahan dengan warga negara lokal maupun asing. (Immigration Department of Malaysia, n.d.) Namun, faktanya banyak PMI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit yang menikah, membawa istri dan keluarganya atau bahkan banyak yang melahirkan anak di Malaysia. Selain itu, para pengusaha dan pengelola perkebunan kelapa sawit menggunakan keluarga, istri dan anak PMI sebagai buruh dengan upah yang rendah. Pelanggaran tersebut terjadi karena kontrak kerja mereka yang relatif panjang yaitu diatas 5 tahun. Anak-anak dari PMI tersebut membawa persoalan baru bagi pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Malaysia. Anak-anak PMI tersebut posisinya menjadi *non-procedural*, yaitu mereka tidak memiliki dokumen yang resmi dan tidak diakui keberadaannya di Malaysia, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat mengakses pendidikan dasar di sekolah kebangsaan Malaysia. Salah satu persoalan yang menghambat anak-anak PMI di Malaysia dalam memperoleh pelayanan pendidikan adalah tidak adanya akta kelahiran.

Sebagian anak PMI di Malaysia lahir dari orang tua yang menikah tanpa surat, sehingga tidak dapat membuat akta kelahiran untuk kepentingan anaknya. Dalam Peraturan Ketenagakerjaan di Malaysia mewajibkan pekerja migran untuk memiliki dokumen-dokumen legal dan dilarang melakukan pernikahan dengan warga negara lokal maupun asing. Padahal akta kelahiran merupakan salah satu persyaratan bagi setiap anak untuk belajar di lembaga pendidikan. Akta kelahiran juga merupakan salah satu persyaratan untuk pembuatan paspor. PMI yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan di Malaysia menciptakan masalah baru bagi anak-anak PMI yang dilahirkan di Malaysia. Anak-anak ini sulit untuk memperoleh akta kelahiran sehingga tidak diakui keberadaannya di Malaysia, dan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Untuk memperoleh akta kelahiran anak, para PMI membutuhkan surat pengakuan bersalin dari rumah sakit untuk diserahkan ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaysia. Dokumen yang diperlukan untuk memproses akta kelahiran di JPN Malaysia adalah paspor ayah dan ibu, visa yang masih berlaku, surat nikah, dan kartu perawatan semasa hamil. Selain membuat akta kelahiran di JPN Malaysia, PMI juga harus membuat akta kelahiran di KBRI Kuala Lumpur, syarat membuatnya adalah dengan membawa akta kelahiran dari JPN yang di legalisir oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia, paspor ayah dan ibu yang masih berlaku, surat nikah (jika surat nikah berasal dari negara lain harus melegalisir surat nikah tersebut ke Kedutaan tempat yang mengeluarkan surat nikah tersebut dan di legalisir ke Kementerian Luar Negeri Malaysia). (Febi Khaira, n.d.)

Faktanya, banyak dari PMI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki surat nikah sehingga menjadikan PMI tersebut statusnya *undocumented* karena telah melanggar Peraturan Ketenagakerjaan Malaysia, yang melarang pekerja asing untuk melakukan pernikahan. Masa kontrak PMI relatif panjang dari 5-10 tahun dan membuat PMI melakukan pelanggaran seperti melakukan

pernikahan dan memiliki anak di Malaysia. Selain karena para PMI tidak memiliki dokumen resmi, terdapat hambatan lainnya dalam mendaftarkan kelahiran anak PMI tersebut yaitu mendaftarkan kelahiran di Malaysia membutuhkan biaya, baik biaya administrasi maupun biaya transportasi menuju JPN, selain itu rendahnya tingkat kesadaran para PMI akan pentingnya mengurus akta kelahiran anaknya. Padahal akta kelahiran anak sangat penting untuk persyaratan dalam mendapatkan layanan pendidikan. Anak-anak PMI di Sabah dan Sarawak mayoritas tidak memiliki dokumen perjalanan yang resmi seperti paspor, izin tinggal ataupun visa masuk disebabkan anak-anak datang ke Malaysia bersama orang tuanya secara ilegal tanpa surat resmi atau paspor, dan mereka lahir dari orang tua yang tidak memiliki paspor dan akta nikah, sehingga tidak dapat mengurus pembuatan paspor. Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang memuat identitas pemegangnya, untuk melakukan perjalanan antar negara dan berlaku selama jangka waktu tertentu. (KBRI Kuala Lumpur, n.d.-b) Oleh karena itu, setiap warga negara yang ingin melakukan perjalanan ke negara lain harus memiliki paspor. Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur, mencatat bahwa pada tahun 2014 jumlah PMI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi dan paspor dari Semenanjung Malaysia berjumlah 22.373, di mana 526 tersebut adalah anak-anak. (Purbayanto, 2016) Kementerian Hak Asasi Manusia Malaysia mengakui pentingnya tenaga kerja asing bagi perekonomian negaranya, namun disisi lain, Kementerian Dalam Negeri Malaysia memandang pekerja migran *undocumented* sebagai masalah keamanan yang harus ditanggapi dengan peningkatan pengawasan. Pada tahun 2001, Perdana Menteri Malaysia menyebut pekerja migran yang tidak berdokumen resmi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga harus melakukan deportasi kepada pekerja migran yang ilegal. (Juliawan, n.d.) Hal ini berarti PMI yang berstatus *undocumented* tidak memiliki hak hukum dan bahkan dianggap sebagai ancaman bagi Malaysia.

Untuk menetap dalam kurun waktu yang relatif lama, maka PMI dan anggota keluarganya juga harus memiliki visa atau izin tinggal. Anak-anak PMI yang tidak memiliki paspor, maka mereka tidak bisa memperoleh visa, karena paspor adalah salah satu persyaratan dalam pengajuan pembuatan visa (VISA, n.d.) Warga negara asing yang memerlukan visa untuk memasuki Malaysia harus mengajukan permohonan dan mendapatkan visa terlebih dahulu di Kantor Perwakilan Pemerintah Malaysia di luar negeri sebelum memasuki Malaysia. (*Malaysia Visa Information, Types of Visa, Where and How to Apply*, n.d.) Untuk pekerja asing, kebijakan Malaysia yang mulai efektif sejak 6 Januari 2011 menegaskan bahwa semua pekerja asing yang telah diberikan *Visa Pass Temporary Employment* (VPTE) harus mendapatkan *Visa With Reference* (VDR) dari Kedutaan Malaysia atau Komisi Tinggi Malaysia sebelum memasuki Malaysia, jika pekerja asing melanggar peraturan ini akan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dan dapat dikembalikan ke negara asal. VDR merupakan visa yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan

Pemerintah Malaysia di luar negeri untuk non-warga negara untuk memungkinkan individu memasuki Malaysia setelah visa disetujui oleh Departemen Imigrasi Kantor Pusat. (Malaysia Visa Information, Types of Visa, Where and How to Apply, n.d.) Prosesnya yang terbilang cukup rumit membuat banyak dari mereka yang pada akhirnya tidak mendaftarkan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki, sehingga anak-anak PMI yang berstatus *undocumented* ini tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak yaitu yang didukung oleh sarana, prasarana dan pendidik atau guru yang berkualitas, sedangkan mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Masalah Pendidikan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak

Status *undocumented* pada PMI dan keluarganya menyebabkan pemerintah Malaysia tidak dapat memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak PMI. Permasalahan ilegalitas menimbulkan minimnya akses pendidikan bagi anak-anak PMI dan menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia beserta perwakilannya di Malaysia dalam memberikan akses pendidikan yang layak. Masalah pendidikan anak-anak PMI pertama kali muncul karena adanya kebijakan pemerintah Malaysia yaitu Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan Tahun 2001. Sebelum tahun 2003, para PMI yang berstatus *undocumented* masih dapat bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya di sekolah kebangsaan Malaysia meski tidak memiliki dokumen resmi. (KBRI Kuala Lumpur, 2010) Namun, setelah pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan melalui Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan Tahun 2001, aktivitas PMI ilegal dan anggota keluarganya dibatasi negara. Semua pekerja asing di Malaysia harus memiliki dokumen resmi. Pemerintah Malaysia melarang siswa asing yang tidak memiliki dokumen data diri untuk belajar di sekolah kebangsaan Malaysia.

Kebijakan yang diberikan pemerintah Malaysia ini berdampak pada anak-anak PMI yang tidak punya dokumen data diri dan izin tinggal di Malaysia sehingga terpaksa dikeluarkan dari sekolah. (KBRI Kuala Lumpur, 2010) Pada tahun 2008, dalam acara Annual Consultation di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia menyepakati pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), namun SIKK hanya bisa menampung anak-anak PMI yang memiliki akta lahir atau kartu pelajar, sehingga hanya dapat memberi layanan pendidikan secara formal. SIKK ternyata hanya mampu melayani pendidikan anak-anak PMI yang berada di Kota Kinabalu dan daerah sekitarnya. SIKK belum bisa menjangkau kepentingan pelayanan pendidikan anak-anak PMI di area perkebunan Sarawak, sehingga akses pendidikan tetap terbatas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendirikan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia di Malaysia yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang terdiri dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), SIKK yang dikategorikan sebagai sekolah ekspatriat (*expatriate school*). (Purbayanto, 2018) Sedangkan layanan pendidikan bagi anak-

anak PMI yang bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit di Sarawak diselenggarakan melalui CLC.

Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu bahwa anak-anak Indonesia yang berada di Sarawak berkisar 3.000 anak. Awalnya pendidikan anak PMI tersebut telah ditangani oleh LSM Humana Child Aid Society. Humana merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan di negara-negara berkembang, seperti di Afrika, Asia, atau negara berkembang lainnya yang memiliki banyak anak terlantar yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. LSM ini mendapat dukungan dari organisasi dunia, seperti United Nations Children's Fund (UNICEF). (Anastasia Christie, 2016) LSM Humana menggunakan kurikulum pendidikan Malaysia, pembelajarannya sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, maka proses belajar mengajar di LSM Humana mengikuti Huraian Sukatan Kurikulum Malaysia. (Komunikasi Pribadi, Farid Maruf) Pendidikan yang dihasilkan oleh LSM Humana ternyata tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah di Indonesia maupun Malaysia, karena mata pelajaran yang diajarkan lebih dominan pada kurikulum Malaysia, sehingga tidak sesuai dengan kurikulum di Indonesia, dan diperlukan sekolah yang dapat melayani pendidikan secara memadai yang menggunakan kurikulum Indonesia. (Komunikasi Pribadi, Farid Maruf) Adanya perbedaan sistem pendidikan dan kurikulum antara Indonesia dan Malaysia menjadikan kendala bagi anak-anak PMI yang ingin menempuh pembelajaran di Malaysia.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia wajib memberikan akses pendidikan terhadap anak-anak PMI hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya khususnya Pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtuanya, atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal anak tersebut di negara tujuan kerja. (*UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya*), n.d.) Maka pemerintah Indonesia wajib memberikan akses terhadap anak-anak PMI berdasarkan alasan bahwa anak-anak PMI yang *undocumented* juga wajib untuk tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak yang didukung oleh sarana dan prasarana juga guru-guru yang berkualitas.

Kepentingan nasional Indonesia tercipta dari kebutuhan Indonesia untuk memberikan akses

pendidikan bagi anak-anak PMI di Sarawak yang mayoritas berstatus *undocumented*. Konsep kepentingan nasional ini digunakan pemerintah Indonesia untuk pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak PMI di Sarawak karena anak-anak tersebut juga merupakan anak-anak Indonesia yang wajib mendapatkan perlindungan dan dipenuhi akses ke pendidikannya oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 Pasal 30 menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kepentingan nasional terkait pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan kepentingan nasionalnya adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendirikan Community Learning Center (CLC). CLC merupakan tempat kegiatan belajar yang tersebar di ladang-ladang perkebunan Malaysia. Keberadaan CLC sangat penting untuk memperluas layanan akses pendidikan bagi anak-anak PMI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Upaya Pemerintah Indonesia dengan diwujudkannya CLC ini merupakan tujuan yang harus dicapai dengan cara melakukan negosiasi dengan pemerintah Malaysia, dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. (*PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar [JDIH BPK RI]*, n.d.) Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung setiap upaya dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI.

Pendidikan bagi beberapa PMI memang bukan menjadi prioritas, sikap orang tua yang kurang menyadari arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka juga sering menjadi kendala. (Rahmawati, 2018) Pada akhirnya banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan memilih untuk membantu orang tuanya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan kepentingan nasionalnya yaitu menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak PMI.

Pendirian Community Learning Center di Sarawak

Indonesia mempunyai batas darat dengan Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan panjang mencapai 2.004 kilometer. Terdiri dari Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak sejauh 857 kilometer dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Tawau sepanjang 1.147 kilometer. Sarawak berbatasan dengan Laut Natuna, Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam di Utara, Negeri Sabah di Timur, Kalimantan Barat dan Pulau Serasan di Barat, dan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Selatan. Pemerintahan Sarawak berdasar pada dua konstitusi, yaitu Konstitusi Negeri (negara bagian/otonomi wilayah), dan Konstitusi Federal (Perlembagaan negeri dan Perlembagaan Persekutuan). (KJRI Kuching Sarawak, n.d) Sarawak memiliki perkebunan sawit yang luas, sehingga Sarawak menjadi salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Para pekerja di perkebunan

sawit tersebut mayoritas berasal dari Indonesia, seperti perusahaan Sime Darby Plantation, dari seluruh tenaga kerja asing yang berada di Sime Darby 90% nya adalah PMI yang berasal dari Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. (DPR RI, 2010) Salah satu bentuk upaya diplomasi Indonesia dan Malaysia terkait pendidikan adalah didirikannya CLC untuk anak-anak PMI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia.

Upaya pembentukan CLC di Sarawak merupakan bentuk diplomasi *soft power* Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar di Sarawak. Dalam menyediakan akses dan fasilitas pendidikan untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia bagi anak-anak PMI yang mayoritas *undocumented*, pemerintah Indonesia awalnya mendirikan CLC di Sabah berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang tercantum dalam "The 8th Annual Consultations" di Lombok pada tanggal 20 Oktober 2011 yaitu Malaysia memberikan izin pendirian CLC untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak PMI di area perkebunan Sabah. (Pensosbud KJRI Tawau, n.d.)

Berbeda dengan CLC di Sarawak yang baru mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat dan Kementerian Pendidikan Malaysia setelah diadakannya pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada tanggal 6 Februari 2015 di Putrajaya. (CAKARA KBRI Kuala Lumpur, n.d.) Setelah pertemuan bilateral, Ari Purbayanto selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur periode 2014-2018 bertemu dengan Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia (BPS-KPM) pada Juni 2015, untuk menindaklanjuti kesepakatan pendirian sekolah bagi anak pekerja ladang sawit di Sarawak. Negosiasi juga bertujuan untuk membahas pengurusan izin dan legalitas pendirian CLC di Sarawak. Proses pendaftaran CLC hingga mendapatkan legalitas membutuhkan waktu satu tahun setelah diadakannya pertemuan bilateral di tahun 2015 karena izin operasional CLC tidak cukup hanya diperoleh dari pemerintah Malaysia saja, tetapi juga harus disetujui oleh pemerintah setempat, dalam hal ini adalah Negara Bagian Sarawak.

Oleh karena itu, KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kuching juga melakukan negosiasi dengan Pemerintah Negara Bagian Sarawak, Dinas Pendidikan Negeri Sarawak, dan Pemerintah Negeri Sarawak di tingkat daerah untuk menindaklanjuti kesepakatan pendirian sekolah bagi anak pekerja ladang sawit di Sarawak. Negosiasi juga bertujuan untuk membahas pengurusan izin dan legalitas pendirian CLC di Sarawak. Kurang lebih satu tahun setelah pertemuan bilateral, CLC yang didirikan mendapat pengesahan dari Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia (BPS-KPM) dan

didaftarkan resmi pada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS), sehingga pemerintah Malaysia baru menyetujui pendirian CLC di Sarawak pada tahun 2016. (KJRI Kuching Sarawak, n.d.) Presiden RI Joko Widodo juga menjanjikan pendirian 50 CLC di Sarawak saat kunjungannya ke Kuching, Sarawak pada 22 November 2017. Pada 2018, Rusdi Kirana selaku Duta Besar RI untuk Malaysia yang meresmikan pendirian 50 CLC di Sarawak. Untuk menerima janji Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan saat kunjungan ke Kuching Sarawak, Duta Besar RI untuk Malaysia telah menggenapi target mendirikan 50 CLC di wilayah Sarawak. Sebanyak 17 CLC yang baru dibuat di Bintulu, Miri, Sibu, Mukah, Sri Aman, Samarahan, dan Kuching, Sarawak, telah dilengkapi dengan total 53 CLC yang diresmikan oleh Dubes Rusdi Kirana. (Betty, D.& Wulan, Z. 2019) Peresmian CLC ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia beserta perwakilannya di Malaysia dalam memberikan tanggungjawab pelayanan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Sarawak.

Melalui diplomasi Soft Power khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai, dalam hal ini, diplomasi dilakukan melalui pertemuan *government to government* antara kedua pemimpin negara hingga pertemuan para diplomat atau perwakilan RI di Malaysia yaitu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kinabalu, dan KJRI Tawau dengan kunjungan ke berbagai instansi terkait di Malaysia. Semua perwakilan RI di Malaysia memiliki fungsi untuk meningkatkan perlindungan bagi semua WNI termasuk PMI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit Sarawak. Anak-anak PMI tersebut juga merupakan bagian dari WNI yang harus diberikan perlindungan terutama dalam pemenuhan akses pendidikan. Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang telah berlangsung dalam mewujudkan CLC merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Banyaknya anak-anak PMI yang berada di Sarawak membuat pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Malaysia untuk terus meningkatkan jumlah CLC demi memenuhi hak akan pendidikan bagi anak PMI. Untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak PMI di perkebunan kelapa sawit, pemerintah Indonesia terus berdiplomasi dengan pemerintah Malaysia agar permasalahan pendidikan ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Malaysia.

Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia beserta perwakilannya di Malaysia tentunya mengacu pada kepentingan nasional Indonesia dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan dasar bagi anak-anak PMI yang mayoritas *undocumented*. Dalam upaya diplomasinya, pemerintah Indonesia dan perwakilannya di Malaysia mendirikan CLC di Sarawak, selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi sarana dan prasarana yang merupakan hal penting dalam mendukung berjalannya pembelajaran di CLC dengan baik.

Peran Perusahaan Kelapa Sawit di Sarawak

Pendirian CLC di Sarawak diselenggarakan oleh perusahaan kelapa sawit di Bintulu maupun Miri Sarawak milik Malaysia.(KBRI Kuala Lumpur, n.d.) Perwakilan RI di Malaysia mendorong pihak perusahaan untuk mengizinkan pendirian CLC di lokasi pemukiman PMI di Sarawak. (Rahmawati, 2018) Beberapa pihak perusahaan menyediakan fasilitas pembelajaran berupa gedung dan guru lokal (guru pamong). Pemerintah Indonesia memiliki peran penting terkait pembangunan CLC Rajawali yaitu memberikan alokasi anggaran untuk membeli peralatan ataupun keperluan sekolah dan pembangunan gedung. KBRI Kuala Lumpur dan KJRI secara aktif dan masif mengundang dan mengumpulkan pemilik perusahaan dan manajer perusahaan ke kantor perwakilan untuk mengajak dan bernegosiasi agar pemilik perusahaan bersedia untuk bekerja sama membuka dan memfasilitasi pembangunan gedung CLC. KBRI Kuala Lumpur dan KJRI juga aktif mengunjungi perkebunan kelapa sawit bertemu dengan PMI dan pemilik perusahaan untuk berdialog terkait CLC dan peran perwakilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan. (Maruf, n.d.) terjalannya negosiasi antara perwakilan RI di Malaysia dan perusahaan kelapa sawit, maka hal itu akan sangat membantu dalam proses penyelenggaraan CLC salah satunya bantuan dalam pembangunan gedung. Gedung sekolah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Pembangunan gedung CLC ini juga dibantu oleh pihak Perusahaan Sime Darby Plantation.

CLC Rajawali-Derawan (CLC Rader Zone) didirikan pada 9 Januari 2014 berada di bawah naungan Perusahaan Sime Darby Plantation. Letaknya 52 km dari Kota Bintulu, terus masuk ke ladang sepanjang 2 km dari Jalan Bintulu-Miri. CLC Rajawali merupakan CLC yang paling dekat dari Kota Bintulu. Bangunan CLC Rajawali ini cukup bagus, mengikuti standar sekolah di semua ladang Sime Darby. Terdiri dari dua ruang kelas besar, rumah guru berkamar dua, toilet, taman bermain. Lingkungan perumahan di sekitar CLC cukup baik, tertib, dan mengikuti standar internasional (keamanan dan keselamatan). Namun, CLC Rajawali ini memiliki keterbatasan dalam bahan buku bacaan dan peralatan pendidikan. (Purbayanto, 2018a) CLC Rajawali juga mengikuti kurikulum nasional Indonesia. (Purbayanto, 2018a) CLC Rader Zone ini diresmikan pada Juli 2015, general manager Sime Darby Plantation Sarawak Mr. Andrew Cheng Mui Fah mengatakan bahwa pihak perusahaan akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap anak-anak PMI yang terpaksa ikut orang tuanya bekerja di Sime Darby dengan menyediakan fasilitas pendidikan kepada mereka dengan alokasi dana sebesar RM 2.000.000 untuk infrastruktur dan pembangunan gedung sekolah di Sime Darby Sarawak. Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Prof. Ari Purbayanto bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan senantiasa memperhatikan pendidikan anak-anak bukan hanya di Indonesia bahkan yang berada di luar negeri termasuk yang berada di Sarawak. Bantuan yang selama ini telah disalurkan oleh Kemendikbud adalah berupa Bantuan Operasional Pendidikan untuk dua buah CLC masing-masing sebesar Rp 123.825.500 dan memberikan insentif untuk guru-guru CLC di Sarawak. Sementara itu Konsul Jenderal RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini KJRI Kuching dan KBRI Kuala Lumpur berkomitmen dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap anak-anak BMI karena ini juga merupakan salah satu misi perwakilan untuk memberikan perlindungan optimal kepada WNI yang berada di Sarawak.(KJRI Kuching Sarawak)

Pemerintah memiliki peran penting terkait pembangunan CLC Rajawali yaitu memberikan alokasi anggaran untuk membeli peralatan ataupun keperluan sekolah dan pembangunan gedung. Pembangunan gedung CLC ini juga dibantu oleh pihak Perusahaan Sime Darby Plantation. KBRI Kuala Lumpur dan KJRI secara aktif dan masif mengundang dan mengumpulkan pemilik perusahaan dan manajer perusahaan ke kantor perwakilan untuk mengajak dan bernegosiasi agar pemilik perusahaan bersedia untuk bekerja sama membuka dan memfasilitasi pembangunan gedung CLC. KBRI Kuala Lumpur juga aktif mengunjungi perkebunan kelapa sawit bertemu dengan PMI dan pemilik perusahaan untuk berdialog terkait CLC dan peran perwakilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan.(Maruf, n.d.) Dengan terjalannya negosiasi antara KBRI Kuala Lumpur dan perusahaan kelapa sawit, maka hal itu akan sangat membantu dalam proses penyelenggaraan CLC salah satunya bantuan dalam pembangunan gedung. Gedung sekolah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

Dalam memberikan pelayanan dan menunjang kualitas pendidikan pada CLC terdapat dua klasifikasi guru bina dan guru lokal atau pamong. Pertama, guru bina yaitu guru yang dikirim oleh pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dan umumnya lulusan sarjana pendidikan. Fungsi guru bina adalah untuk mengajar anak-anak CLC, membuat kurikulum dan membina guru pamong.(Maruf, n.d.) Kedua, guru lokal atau pamong adalah guru yang direkrut oleh pihak perusahaan kelapa sawit pengelola CLC baik WNI maupun warga negara Malaysia untuk mengajar dengan minimum berijazah SMA/SMK sehingga umumnya hanya dapat mengajar menghitung dan membaca. Beberapa contoh perusahaan kelapa sawit yang menyediakan guru pamong adalah Ladang Segarmas, Sarimas, dan Ladang 3 Sarawak.(Maruf, n.d.) Pihak perusahaan membayar gaji guru pamong sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial dari kesediaan perusahaan memfasilitasi pendidikan anak-anak PMI melalui CLC. Sumber dananya bisa melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan jumlah yang dibayarkan juga tidak terlalu besar dibanding dengan Guru Bina yang dibayar oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Sarawak karena perusahaan tersebut ikut berperan dalam penyediaan guru pamong untuk membantu proses belajar anak-anak CLC. Aktor bisnis yang berperan adalah perusahaan kelapa sawit Malaysia seperti perusahaan Ladang Segarmas, Sarimas, Ladang 3 Sarawak, dan Sime Darby. Seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Malaysia dalam menyediakan prasarana untuk mendukung proses belajar seperti ruang kelas, meja dan bangku, ruang kantor. Perusahaan juga menyediakan guru pamong yang direkrut oleh pihak perusahaan kelapa sawit pengelola CLC baik WNI maupun warga negara Malaysia untuk membantu dalam proses kegiatan belajar anak-anak CLC yang orang tuanya bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit di Sabah dan Sarawak. Perusahaan kelapa sawit Malaysia ini harus bertanggung jawab atas hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak PMI yang orang tuanya bekerja pada perusahaan kelapa sawit tersebut. Hak-hak yang seharusnya didapatkan antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan, dimana anak-anak PMI seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Perusahaan kelapa sawit menyediakan prasarana lainnya seperti ruang kelas, meja dan bangku, ruang kantor. Kualitas dan kuantitas prasarana tersebut tergantung dari niat baik masing-masing perusahaan kelapa sawit. (Maruf, n.d.) Perusahaan kelapa sawit bersedia menyelenggarakan pendirian CLC dengan membantu melengkapi sarana dan prasarana juga menyediakan guru pamong karena dengan adanya CLC anak-anak pekerja ladang bisa bersekolah dan mendapat jaminan ijazahnya sehingga dapat digunakan untuk sekolah di Indonesia. (Maruf, n.d.) Hal ini membuat pekerja lebih tenang dan bisa bekerja dengan baik.

Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada tahun 2015 merupakan momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintahan Indonesia dan perwakilan RI di Malaysia untuk kembali memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia di Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta untuk perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia melalui pendirian CLC, khususnya di wilayah Sabah dan Sarawak. (Rahmawati, 2018) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pembentukan CLC di Sarawak adalah melalui KBRI Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching yang berusaha mengajak perusahaan yang mempekerjakan PMI di perkebunan kelapa sawit untuk bekerja sama dalam memberikan perhatian dan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sarawak. Pendirian CLC di Sarawak diselenggarakan oleh perusahaan kelapa sawit di Bintulu maupun Miri Sarawak milik Malaysia.⁹⁴ KBRI Kuala Lumpur mendorong pihak perusahaan untuk mengizinkan pendirian CLC di lokasi pemukiman PMI di Sarawak. (Rahmawati, 2018) Beberapa pihak perusahaan menyediakan fasilitas pembelajaran berupa gedung dan guru lokal (guru pamong).

Kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dikategorikan ke dalam diplomasi *soft power* karena diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam rangka memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di Sarawak menggunakan pendekatan *soft power* seperti negosiasi dan perundingan kedua kepala negara dan perusahaan kelapa sawit Malaysia serta pertemuan antara pihak-pihak terkait dari masing-masing negara seperti perwakilan RI di Malaysia.

Program Repatriasi Siswa CLC Untuk Pendidikan Lanjut di Indonesia

Program repatriasi ini merupakan kegiatan tahunan hasil kerjasama pihak Kemdikbud RI dengan perwakilan RI. Sejak tahun 2015 secara masif anak-anak PMI kembali ke Indonesia melalui program repatriasi pendidikan dengan jalur beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan mandiri. Anak-anak PMI yang bersekolah di CLC diizinkan oleh pemerintah Malaysia untuk tinggal dan memperoleh pendidikan dengan maksimal berusia 12 tahun, setelah itu harus direpatriasi ke Indonesia. Pendirian CLC di perkebunan kelapa sawit ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Sabah dan Sarawak. Namun pemenuhan pendidikan melalui CLC ini hanya tersedia hingga jenjang SMP, sehingga untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMA siswa di CLC harus menempuh pendidikan di Indonesia. (Layanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Indonesia di Malaysia) Upaya untuk memfasilitasi kelanjutan pendidikan melalui beasiswa ADEM bagi para siswa setelah lulus SMP harus dilakukan secara terus-menerus agar siswa dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud RI, menyalurkan 500 paket beasiswa ADEM untuk anak-anak PMI di Malaysia. Beasiswa ADEM atau yang biasa dikenal dengan "Beasiswa Repatriasi" ini diperuntukan bagi lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di Indonesia. Mereka akan menerima beasiswa penuh termasuk biaya pendidikan dan biaya hidup, sampai menuntaskan pendidikan jenjang sekolah menengah atas. Penerima Beasiswa (Beswan) repatriasi ini sebagian besar terdiri dari siswa-siswi lulusan CLC SMP di Sabah dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Namun, CLC Sarawak hanya memfasilitasi 13 orang siswa lulusannya untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah di Indonesia. (Kemlu) Jumlah siswa CLC Sarawak yang direpatriasi ke Indonesia hanya sebagian kecil dari beasiswa yang diberikan yaitu 500 paket beasiswa pada tahun 2019, padahal anak-anak CLC di Sarawak seharusnya bisa direpatriasi lebih banyak lagi untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik lagi dan diharapkan semakin sedikit pencari kerja dari Indonesia yang *unskill* berangkat keluar negeri.

Untuk melakukan repatriasi kepada anak-anak CLC, pemerintah Indonesia beserta perwakilannya juga mengalami beberapa kendala. Yang pertama, pihak orang tua yang belum paham arti pentingnya pendidikan, sehingga ketika anak-anak ingin direpatriasi ke Indonesia untuk melanjutkan sekolah, beberapa orang tua tidak setuju atau tidak mengizinkan anaknya untuk melanjutkan sekolah di Indonesia karena tidak mau berpisah dengan anaknya. Yang kedua, tantangan di Indonesia yaitu ketika tidak semua sekolah bersedia untuk menerima anak-anak CLC. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa untuk repatriasi anak-anak PMI sehingga bisa bersekolah di Indonesia untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi. Setelah lulus SMA di Indonesia, anak-anak PMI bisa mendapatkan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dari pemerintah untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Beasiswa tersebut merupakan insentif bagi sekolah yang menerima anak-anak PMI. Terkait dengan permasalahan orang tua yang tidak bersedia melepaskan anaknya, para guru bina secara berkala memberikan penjelasan akan pentingnya pendidikan secara rutin. Saat ini kesadaran bersekolah tersebut sudah cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2018. (Komunikasi Pribadi, Farid Maruf) Indonesia masih berupaya dalam mengatasi masalah yang ada agar anak-anak PMI dapat melanjutkan SMA di Indonesia, sehingga anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan orang tuanya.

Program repatriasi siswa ini juga merupakan terusan dari kepentingan nasional Indonesia untuk memberikan tanggung jawab pendidikan kepada anak-anak Indonesia ini. Program ini bertujuan untuk terus memberikan pendidikan kepada anak-anak PMI sampai dengan pendidikan tinggi yang nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selain itu tentunya akan membuka jalan bagi anak-anak PMI untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi dibanding orangtuanya. Namun, pembagian beasiswa tersebut masih belum merata di Malaysia, yang mana pada tahun 2019 CLC Sarawak hanya memulangkan 13 siswanya. Diharapkan kedepannya pemerintah Indonesia dapat memulangkan lebih banyak lagi siswa CLC Sarawak ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan mereka, karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak Indonesia lainnya untuk mendapatkan akses pendidikan setinggi mungkin.

KESIMPULAN

Terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Sarawak merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia, masalah itu semakin serius dengan status *undocumented* yang dimiliki anak-anak tersebut sehingga tidak dapat mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia yang

melibatkan perwakilan RI di Malaysia terutama KBRI Kuala Lumpur melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching yang memiliki peranan penting dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Diplomasi antara pemerintah Indonesia beserta perwakilan RI di Malaysia dengan pemerintah Malaysia dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dalam rangka pemenuhan akses pendidikan anak-anak PMI di Sarawak walaupun pemerintah terus menghadapi masalah disetiap upaya pembentukan CLC, masalah utamanya peraturan imigrasi Malaysia yang menyebabkan status anak-anak PMI ini menjadi *undocumented* di mata hukum Malaysia. Diplomasi yang dilakukan Indonesia terkait pemenuhan akses pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, tidak hanya melibatkan aktor pemerintahan tetapi juga mencakup perusahaan kelapa sawit atau kelompok bisnis. Perusahaan kelapa sawit berperan dalam penyediaan guru pamong dan membantu melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar anak-anak CLC. Dengan adanya CLC anak-anak PMI bisa bersekolah dan mendapat jaminan ijazahnya sehingga dapat digunakan untuk sekolah di Indonesia

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan kepentingan nasionalnya adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendirikan Community Learning Center (CLC) hal ini merupakan bentuk dari diplomasi *soft power*. Kepentingan nasional Indonesia juga mendorong pemerintah untuk memenuhi hak anak-anak PMI di Sarawak agar dapat mengakses pendidikan dasar yang berkualitas yang dilaksanakan melalui CLC berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan pendidikan anak-anak PMI di Sarawak baru mendapatkan perhatian pemerintah di tahun 2015 yaitu ketika diadakannya pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk anak-anak PMI adalah memastikan anak-anak PMI mendapatkan akses pendidikan dasar sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang harus dicapai. Pembukaan CLC sangat penting dilakukan karena anak-anak PMI di Sarawak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah Indonesia juga memiliki program repatriasi siswa untuk pendidikan lanjut di Indonesia agar anak-anak PMI tidak berhenti sekolah sampai tingkatan SMP saja, tetapi meneruskan ke tingkatan SMA dan pendidikan tinggi. Meskipun, siswa CLC di Sarawak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Christie, D. (2016). Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Malaysia. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(4), 1161–1176.
- Betty, D dan Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswar. (2019). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia." *Jurnal HAM*, Volume 10 Nomor 2 (ISSN 1693-8704).
- BNP2TKI. (2019). Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave.
- CAKARA KBRI Kuala Lumpur. (n.d.). Lawatan Presiden Jokowi Bawa Harapan Baru. Edisi 70/15, 1.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu Bandung.
- Djelantik, S. (2016). *Diplomasi dalam Politik Global*. Unpar Press.
- DPR RI. (2010). Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR RI ke Malaysia.
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNJUNGAN-DELEGASI-LUAR-NEGERI-KOMISI-IX-DPR-RI-KE-MALAYSIA-1465267212.pdf>
- Febi Khaira, M. (n.d.). Pendaftaran Kelahiran Anak dari WNI di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur.
<http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/25/surat%02pernyataan-lahir-spl>
- Immigration Department of Malaysia. (n.d.). Foreign Worker. <https://www.imi.gov.my/index.php/en/foreign-worker.html>
- Juliawan, B. (n.d.). Seeing Migration like a State: A Case of Deported Undocumented Migrant Workers from Indonesia. UN Act. <http://un-act.org/publication/view/seeing%02migration-like-state-case-deported-undocumented-migrant-workers-indonesia/>
- KBRI Kuala Lumpur. (n.d.-a). Layanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Indonesia di Malaysia.
<http://kbrikualalumpur.org/w/wp-content/uploads/2017/02/booklet-SILN-Malaysia-Rev1.pdf>
- KBRI Kuala Lumpur. (n.d.-b). Penerbitan Paspor Republik Indonesia (Paspor RI). Kedutaan Besar Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/dili/id/pages/keimigrasian-penerbitan_paspor_ri_1760/etc-menu
- KBRI Kuala Lumpur. (2010). *Diplomasi Perjuangan Kedutaan Tersibuk di Dunia*.
- Kemdikbud. (2019). Mendikbud Pastikan Semua Anak WNI Mendapatkan Hak Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/mendikbud-pastikan-semua-anak-wni-mendapatkan-hak-pendidikan>
- Kemlu RI. Terima Beasiswa Repatriasi, Ratusan Anak PMI Lanjutkan Pendidikan di Indonesia
- KJRI Kuching Sarawak. (n.d.-a). CLC di Sarawak telah diakui secara resmi oleh pemerintah Malaysia.
<https://www.kemlu.go.id/kuching/id/beritaagenda/berita-perwakilan/Pages/CLC-di-Sarawak-telahdiakui-secara-resmi-oleh-pemerintahMalaysia.aspx>

- KJRI Kuching Sarawak. (n.d.-b). Peresmian CLC, Penyerahan Ijazah Ujian Paket A 2014 dan Pemberian dokumen kepada anak-anak BMI undocumented. <http://kjrikuching.blogspot.com/2015/07/peresmian-clc-penyserahan-ijazah-ujian.html>
- KJRI Kuching Sarawak. (n.d.-c). Profil Negeri Sarawak. https://kemlu.go.id/kuching/id/pages/profil_negeri_sarawak/2779/etc-menu
- Malaysia Visa information, types of Visa, where and how to apply. (n.d.). KLIA2 Info. <https://www.klia2.info/trips/malaysia/malaysia-visa-information/>
- Maruf, F. (n.d.). Komunikasi Pribadi.
- Notoprayitno, M. I. (2015). Right to Education for Children of Indonesian Migrant Workers. www.ohchr.org
- Nye, J. (1992). Understanding International Conflicts. Harper Collins College Publisher.
- Nye, J. Soft Power and Higher Education. Forum for the Future of Higher Education. <http://forum.mit.edu/articles/soft-power-and-higher-education/>
- Oppenheim, F. E. (1987). National Interest, Rationality, and Morality. [https://doi.org/Political Theory 15 \(3\):369-389](https://doi.org/Political%20Theory%2015%20(3):369-389) (1987)
- Pensosbud KJRI Tawau. (n.d.). Pelayanan Pendidikan Bagi Anak TKI di Perbatasan.
- PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved January 12, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4861/pp-no-47-tahun-2008>
- Priestley, M., Edwards, R., Priestley, A., & Miller, K. (2012). Teacher Agency in Curriculum Making: Agents of Change and Spaces for Manoeuvre. *Curriculum Inquiry*, 42(2), 191–214
- Purbayanto, A. (2016). Dua Tahun bersama Dubes Herman Prayitno Mencerdaskan Anak Bangsa di Negeri Jiran. Inspira Book.
- Purbayanto, A. (2018a). Buku Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Community Learning Center (CLC) untuk Mendidik Anak-Anak Indonesia di Malaysia Timur. KBRI Kuala Lumpur.
- Purbayanto, A. (2018b). Memorandum Akhir Tugas. KBRI Kuala Lumpur.
- Rahmawati, I. (2018). Kuntum Bunga Bangsa di Ladang Sawit Malaysia. IPB Press.
- Satow, S. E. (1917). A Guide to Diplomatic Practice. Longmans, Green & Co.
- UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). (n.d.). BPK RI. Retrieved January 12, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39025>
- VISA. (n.d.). Kementerian Luar Negeri Indonesia. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9WSVNBX1dFQi5wZG%0AY=>

Wong, Bemen Win-Keong, Suriati Ghazali, & Nooriah Yusof. (2021). The Condition and Challenges of Community Learning Centre in the Oil Palm Plantations of Sarawak, Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1656-1672